



TANTANGAN PROFESIONALISME GURU DI DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR) : KAJIAN LITERATUR TERHADAP KETIMPANGAN PENDIDIKAN

Diah Ayu Purtala Dewi

Universitas Riau

Thoibatul Syamsinar

Universitas Riau

Wanda Rahma Sagita

Universitas Riau

Frima Jeni

Universitas Riau

Alamat: Kampus Bina Widya KM,12,5 Simpang Baru,Kec.Tampan, Kota Pekanbaru,Riau

Korespondensi penulis: diah.ayu3250@student.unri.ac.id

Abstract. *Educational inequality remains a central issue in Indonesia's national development, particularly in 3T regions (Disadvantaged, Frontier, and Outermost). This article aims to explore the challenges of teacher professionalism in these areas through a comprehensive literature review of prior research and policy documents. The findings reveal that teachers in 3T regions face various obstacles, such as low welfare, lack of professional development opportunities, uneven teacher distribution, and difficult geographical conditions that hinder access to education. Furthermore, inadequate infrastructure and uneven budget allocation exacerbate the educational gap. Despite the implementation of several policies, such as the National Teacher Distribution System (SPGN) and the Frontier Teacher Program (GGD), these initiatives still encounter difficulties in execution. A more comprehensive, innovative, and locally responsive approach is needed to enhance the quality and equity of education in 3T areas.*

Keywords: *Educational disparity, teacher professionalism, teacher distribution, public policy*

Abstrak. Ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan profesionalisme guru di wilayah 3T melalui pendekatan studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian dan dokumen kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru di daerah 3T menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraan, keterbatasan pelatihan dan pengembangan profesional, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, hingga kondisi geografis yang menyulitkan akses pendidikan. Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai dan dukungan anggaran yang belum merata semakin memperparah ketimpangan pendidikan. Meskipun berbagai kebijakan seperti Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) dan Program Guru Garis Depan telah diimplementasikan, upaya tersebut masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat komprehensif, inovatif, dan berbasis kebutuhan lokal diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah 3T.

Kata kunci: Distribusi guru, ketimpangan pendidikan, profesionalisme, sistem pendidikan

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa. Namun, realitas di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Ketimpangan ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti kesejahteraan guru, distribusi tenaga pendidik, ketersediaan sarana

dan prasarana pendidikan, serta akses terhadap lembaga pendidikan. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan pendidikan dan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Dalam konteks ini, guru memegang peranan sentral sebagai pelaksana utama proses pembelajaran di sekolah. Akan tetapi, profesionalisme guru di daerah 3T kerap kali terhambat oleh berbagai tantangan struktural dan geografis, termasuk rendahnya insentif, terbatasnya pelatihan, dan minimnya fasilitas pendukung. Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pendidikan di wilayah 3T mengalami hambatan serius yang bersifat sistemik dan multidimensional.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya *gap* antara kebijakan nasional dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam menjamin kesetaraan pendidikan yang berkeadilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian literatur terhadap tantangan profesionalisme guru di daerah 3T, guna mengidentifikasi akar persoalan dan mencari pendekatan yang relevan dalam menjawab ketimpangan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut secara komprehensif melalui pendekatan studi pustaka.

KAJIAN TEORITIS

Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru merupakan aspek krusial dalam mendukung keberhasilan pendidikan, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang menghadapi tantangan geografis, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Profesionalisme guru tidak hanya diukur dari kualifikasi akademik, tetapi juga mencakup kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam konteks 3T, tantangan profesionalisme guru menjadi semakin kompleks akibat keterbatasan infrastruktur pendidikan, minimnya akses terhadap pelatihan berkala, serta rendahnya insentif finansial yang menyebabkan rendahnya motivasi kerja.

Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Guru

Suryaningrum (2023) menekankan bahwa untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di daerah tertinggal, penguatan kapasitas guru harus dilakukan secara menyeluruh, melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi aktif antar pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan studi oleh Vania et al. (2022), yang menunjukkan pentingnya kreativitas guru dalam menghadirkan pembelajaran yang relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman, terutama di era Revolusi Industri 4.0.

Manajemen dan Supervisi Pendidikan

Selain aspek individu, faktor manajerial dan kebijakan institusional juga memainkan peran penting dalam pembentukan profesionalisme guru di daerah 3T. Kajian oleh Asiska dan Nurmahmudah (2022) di SMP Maratua menunjukkan bahwa distribusi guru yang tidak merata dan ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dengan latar belakang kompetensi guru menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Supervisi akademik sebagai instrumen evaluasi dan pengembangan guru juga belum berjalan optimal di wilayah 3T, seperti yang ditemukan oleh Sanoto et al. (2023) di Kabupaten Bengkayang. Dalam hal ini, penguatan sistem supervisi yang reflektif dan berbasis kebutuhan lokal menjadi strategi penting untuk meningkatkan mutu pengajaran.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis studi kajian pustaka (literature review). Metode kajian pustaka ini meliputi kegiatan, mencari, membaca dan menelaah bahan pustaka berupa buku dan jurnal-jurnal yang memiliki hubungan dengan topik penelitian (Azmi Agustina et al., 2024). Menurut buku yang ditulis oleh (Rashid, 2022) literatur review merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk mengumpulkan informasi dan temuan riset yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERMASALAHAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA

1. Rendahnya Kesejahteraan Guru di Daerah 3T

Kesejahteraan guru merupakan aspek krusial dalam menjamin mutu pendidikan, sebab kesejahteraan yang memadai mampu mendorong peningkatan profesionalitas serta motivasi kerja pendidik. Realitas di lapangan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menunjukkan bahwa banyak guru masih mengalami kondisi kesejahteraan yang jauh dari layak.

Berdasarkan data survei yang ada, hanya sebagian kecil guru yang merasa benar-benar sejahtera secara ekonomi dan sosial. Masih banyak guru, terutama yang berstatus honorer di daerah 3T, yang menerima gaji sangat rendah bahkan hanya berkisar antara Rp50.000 hingga Rp300.000 per bulan. Tidak hanya itu, sistem pembayaran yang tidak menentu serta potensi pemberhentian sepihak turut memperburuk kondisi kerja mereka.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pribadi guru, tetapi juga memengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, negara perlu meninjau ulang sistem

pemberian tunjangan dan insentif dengan pendekatan yang lebih adil, serta mendorong distribusi anggaran pendidikan yang berpihak pada wilayah-wilayah marginal.

2. Ketimpangan Pembangunan dan Fasilitas Pendidikan

Upaya pemerataan pendidikan sejatinya tidak hanya berbicara soal akses, tetapi juga menyangkut kesetaraan dalam hal mutu layanan, ketersediaan sarana, dan kelayakan infrastruktur sekolah. Fakta empiris menunjukkan bahwa masih terdapat ribuan sekolah di Indonesia yang belum memenuhi standar nasional pendidikan, baik dari sisi fisik bangunan, media pembelajaran, maupun fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan.

Permasalahan ini semakin kompleks di wilayah 3T, di mana pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sangat lambat. Banyak sekolah tidak memiliki ruang kelas yang memadai, minim alat peraga, bahkan tidak dilengkapi dengan sanitasi yang layak. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan terbatasnya dukungan dari pemerintah pusat turut memperlebar jurang ketimpangan antardaerah.

Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih konkret dan berkelanjutan, seperti penyediaan anggaran khusus pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil, penambahan jumlah tenaga pengajar, serta penguatan fungsi pengawasan terhadap distribusi bantuan pendidikan agar tidak terpusat hanya pada wilayah perkotaan.

3. Rendahnya Kualitas Layanan Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan sistem pendidikan adalah terciptanya layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Namun, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal tata kelola anggaran. Masih sering ditemui kasus di mana alokasi dana pendidikan tidak dikelola secara optimal sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu layanan.

Di sisi lain, pendidikan semakin dipersepsikan sebagai komoditas ekonomi, bukan lagi sebagai hak dasar warga negara. Hal ini terlihat dari meningkatnya biaya pendidikan, baik di tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang menyebabkan kesenjangan akses pendidikan antara kelompok ekonomi bawah dan atas semakin melebar.

Ironisnya, meskipun pendidikan telah diarahkan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja, tingkat pengangguran di kalangan lulusan pendidikan formal masih tinggi. Ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan realitas dunia kerja. Oleh karena itu, perbaikan sistem layanan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan

regulasi hingga evaluasi menyeluruh terhadap output pendidikan nasional.

4. Sulitnya Akses terhadap Lembaga Pendidikan

Kendala geografis menjadi salah satu tantangan fundamental dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Banyak anak usia sekolah di daerah pelosok harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berisiko hanya untuk bisa belajar. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai, medan yang sulit dijangkau, serta minimnya sarana pendukung lainnya menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah.

Masalah ini tidak hanya terjadi di jenjang dasar, tetapi juga pada pendidikan menengah dan tinggi. Di sejumlah daerah, ketiadaan sekolah lanjutan membuat siswa terpaksa berhenti sekolah setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Sementara itu, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sebagian besar anak dari luar Pulau Jawa harus menghadapi tantangan biaya, tempat tinggal, dan adaptasi sosial.

Hal ini menegaskan bahwa tantangan akses bukan semata soal jarak fisik, tetapi juga tentang kemampuan negara dalam menyediakan sistem pendidikan yang inklusif dan menjangkau semua kalangan, termasuk mereka yang berada di wilayah-wilayah paling terluar.

5. Ketimpangan Distribusi dan Kompetensi Tenaga Pendidik

Peran guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan sudah tidak terbantahkan. Namun, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata masih menjadi persoalan serius, terutama di wilayah 3T yang kerap mengalami kekurangan guru berkualifikasi. Banyak guru menolak penugasan di daerah terpencil karena faktor kesejahteraan, minimnya fasilitas, dan keterbatasan peluang pengembangan karier.

Selain distribusi yang tidak merata, masalah lain yang turut mengemuka adalah rendahnya kompetensi pedagogik dan profesional sebagian guru. Di beberapa sekolah, guru harus merangkap mengajar lebih dari satu mata pelajaran karena keterbatasan jumlah tenaga pengajar. Bahkan, tidak jarang guru mengajar di luar bidang keahliannya, yang tentunya berimplikasi pada kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menerapkan strategi rekrutmen dan penempatan guru yang lebih adaptif, termasuk pemberian insentif khusus bagi guru yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Di samping itu, pelatihan berkelanjutan serta program peningkatan kapasitas guru perlu diperluas cakupannya agar semua guru, di mana pun mereka berada, dapat mengembangkan kualitas pengajaran secara konsisten.

TANTANGAN DAN SOLUSI PENDANAAN PENDIDIKAN DIWILAYAH 3T

Permasalahan pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) hingga saat ini masih menjadi sorotan utama dalam kajian pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Maria Ulfa (2023) di SMPN 3 Tempurejo, Jember, mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara mutu pendidikan di daerah 3T dengan wilayah perkotaan. Kesenjangan ini terlihat jelas dari aspek sarana prasarana, distribusi dan kompetensi guru, aksesibilitas geografis, serta kondisi sosial-ekonomi peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar mereka.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian oleh sejumlah akademisi terkait pengembangan mutu pendidikan di Papua sebagai daerah 3T, menekankan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan akses pendidikan, rendahnya jumlah guru profesional, serta minimnya sarana penunjang kegiatan belajar.

Dari berbagai temuan tersebut, dapat dirumuskan bahwa permasalahan pendidikan di wilayah 3T bersifat sistemik dan multidimensional, mencakup empat dimensi utama:

1. Minimnya Sarana dan Prasarana

Sekolah-sekolah di wilayah 3T umumnya mengalami kekurangan fasilitas dasar, mulai dari bangunan yang tidak layak hingga kurangnya alat peraga pendidikan dan media digital. Lingkungan belajar yang kurang memadai ini menghambat proses belajar-mengajar dan menurunkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan akademik.

2. Keterbatasan Guru Berkualitas

Distribusi guru masih belum merata, dengan sebagian besar tenaga pendidik enggan ditempatkan di wilayah terpencil akibat minimnya insentif dan fasilitas hidup. Bahkan tidak jarang, satu guru harus merangkap mengajar beberapa mata pelajaran yang bukan keahliannya karena kekurangan tenaga kerja.

3. Hambatan Geografis

Kondisi geografis menjadi faktor pembatas utama akses pendidikan. Jarak tempuh yang jauh, kondisi jalan yang rusak, serta medan alam yang ekstrem menjadi penghalang siswa untuk dapat hadir di sekolah secara konsisten. Akibatnya, angka putus sekolah di daerah 3T cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Keterbatasan finansial keluarga juga menjadi kendala serius. Banyak siswa dihadapkan pada pilihan antara melanjutkan pendidikan atau membantu perekonomian keluarga. Dalam kondisi tersebut, pendidikan sering kali bukan menjadi prioritas utama.

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Pendidikan

Pengelolaan anggaran pendidikan menjadi komponen strategis dalam upaya menjamin kesetaraan akses pendidikan. Seperti disampaikan oleh Purba et al. (2024), anggaran pendidikan berfungsi sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi operasional pendidikan. Khusus untuk wilayah 3T, pendekatan anggaran perlu mempertimbangkan kompleksitas tantangan lokal yang dihadapi.

Anggota DPR-RI, Anita, menegaskan bahwa kebijakan pengalokasian anggaran harus bersifat afirmatif terhadap daerah 3T, dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan akses dan keterbatasan infrastruktur.

Beberapa langkah konkret yang telah diimplementasikan oleh pemerintah antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

Pemerintah melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah melakukan pembangunan serta rehabilitasi gedung sekolah di daerah 3T, sekaligus menambah fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, hingga penyediaan asrama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.

2. Program Bantuan Finansial dan Transportasi

Lewat Program Indonesia Pintar (PIP), siswa dari keluarga prasejahtera mendapatkan bantuan pendidikan. Sementara itu, transportasi gratis atau subsidi perjalanan juga mulai diberikan untuk siswa yang menempuh jarak jauh, dengan harapan dapat menekan angka putus sekolah.

Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selain meningkatkan akses, aspek kualitas juga menjadi fokus intervensi kebijakan. Beberapa strategi yang telah dilakukan pemerintah antara lain:

1. Penguatan Kompetensi Guru

Program Guru Garis Depan (GGD) dan pelatihan rutin bagi tenaga pengajar merupakan upaya peningkatan mutu pedagogik. Namun, cakupan program ini perlu diperluas agar mampu menjangkau lebih banyak guru di daerah 3T.

2. Distribusi Sumber Belajar

Pemerintah juga telah mendistribusikan buku-buku pelajaran dan perangkat teknologi pembelajaran seperti komputer dan akses internet untuk menunjang pembelajaran digital, yang mulai diperkenalkan melalui e-learning.

3. Model Sekolah Terpadu Berbasis Vokasi

Sekolah dengan sistem terpadu yang menggabungkan pelajaran akademik dan keterampilan kerja diarahkan agar lulusan tidak hanya siap melanjutkan pendidikan, tapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan kerja lokal di daerahnya.

4. Pembiayaan Inovatif dan Efisiensi Sistem

Sebagai solusi jangka panjang, strategi pembiayaan pendidikan dituntut untuk lebih inovatif dan efisien. Menurut Purba et al. (2024), efisiensi anggaran tidak hanya dilihat dari jumlah yang dikeluarkan, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang dicapai. Beberapa pendekatan yang digunakan pemerintah meliputi:

.a. Fleksibilitas Dana BOS

Sekolah di daerah 3T diberikan keleluasaan lebih dalam penggunaan dana BOS, termasuk untuk menggaji guru honorer dan pengadaan perangkat pembelajaran. Hal ini bertujuan agar dana bisa langsung menjawab kebutuhan lokal.

b. Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPBU)

Pemerintah mulai mengadopsi skema pembiayaan alternatif melalui kerja sama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Namun, skema ini tetap memerlukan sistem pengawasan yang ketat agar transparan dan tepat sasaran.

c. Pendanaan Berbasis Capaian

Model pembiayaan ini memberikan insentif kepada daerah yang berhasil memenuhi indikator kinerja pendidikan, seperti peningkatan angka partisipasi atau kelulusan. Strategi ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas dan kompetisi sehat antarwilayah.

Meningkatkan Efisiensi Sistem Pendidikan

Efisiensi dalam sistem pendidikan terbagi dalam dua dimensi:

1. Efisiensi Internal

Mengacu pada optimalisasi sumber daya yang digunakan dalam proses pendidikan. Hal ini dapat dicapai melalui pengurangan biaya operasional yang tidak produktif, alokasi anggaran

berbasis kebutuhan pembelajaran, pemanfaatan ruang belajar secara maksimal, serta peningkatan etos kerja guru.

2. Efisiensi Eksternal

Dilihat dari dampak jangka panjang pendidikan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Efisiensi ini terwujud apabila lulusan pendidikan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya, berkontribusi terhadap pembangunan lokal, serta memperkecil kesenjangan sosial.

Apabila dikelola secara tepat, integrasi antara perluasan akses, peningkatan mutu, serta efisiensi anggaran akan mampu mendorong pemerataan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini termarginalkan secara geografis maupun struktural.

PEMERATAAN GURU DAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERATAN GURU NASIONAL (SPGN)

Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) merupakan sebuah sistem yang mengatur penempatan guru dalam proses rekrutmen CPNS dengan tujuan untuk meratakan distribusi tenaga pengajar di Indonesia. Sistem ini dibuat untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan dari awal hingga akhir. Berikut adalah tata cara pelaksanaan SPGN :

1. Mengembangkan rasa cinta terhadap negara dan semangat pengabdian yang tinggi kepada calon pengajar sejak mereka menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Seorang guru atau ASN sebagai pegawai negeri perlu memahami dengan baik peran pelayanan dan dedikasi mereka kepada negara. Dengan demikian, calon guru atau ASN siap untuk ditempatkan di manapun demi mengabdikan kepada bangsa.
2. Menempatkan guru di daerah selama minimal dua tahun. Setiap guru yang telah berhasil dalam ujian CPNS akan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdikan selama sekurang-kurangnya dua tahun, setelah itu guru diperbolehkan untuk memilih tinggal atau kembali ke daerah asal mereka.
3. Menerima akses yang lebih luas untuk melanjutkan pendidikan. Setelah menyelesaikan masa pengabdian yang diwajibkan, para guru mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan mereka (beasiswa). Dengan cara ini, hal tersebut tidak hanya menjadi motivasi tetapi juga dapat meningkatkan kualitas guru.
4. Menyediakan jaminan hukum serta perlindungan yang memadai. Seorang pendidik yang ditugaskan ke daerah tertentu perlu mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan agar merasa aman dari berbagai ancaman serta gangguan di tempat kerjanya.

5. Menyediakan tunjangan yang cukup. Menyediakan tunjangan yang cukup merupakan salah satu cara untuk menunjukkan penghargaan negara terhadap guru dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar di Indonesia. Tujuannya adalah agar profesi guru diakui sebagai suatu pekerjaan yang profesional. Salah satu faktor yang mengakibatkan penurunan kualitas guru adalah kegiatan tambahan yang dilakukan guru selain mengajar, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti berjualan, bertani, berternak, dan aktivitas lainnya yang mengalihkan perhatian guru dari tugas utamanya. Seorang guru dapat dianggap sebagai tenaga profesional saat kebutuhan dasarnya sebagai pengajar terpenuhi.
6. Menyusun kontrak yang jelas. Menyusun kontrak dengan kejelasan adalah langkah untuk memastikan sejauh mana pemerintah memberikan jaminan keamanan, kesejahteraan, dan kualitas pengajaran. Kontrak tersebut mencakup beberapa poin penting yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN), diharapkan tidak ada lagi daerah yang kekurangan tenaga pengajar serta daerah yang memiliki mutu pendidikan yang rendah. SPGN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi ketimpangan pendidikan antar daerah di Indonesia.

Dengan adanya Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) diharapkan tidak ada lagi daerah yang kekurangan guru serta daerah dengan kualitas pendidikan yang rendah. SPGN diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan.

INOVASI DAN PENDEKATAN BARU DALAM PENDIDIKAN 3T

Krisis dalam sektor pendidikan di berbagai wilayah 3T di Indonesia adalah isu yang rumit dan mendalam. Tempat-tempat ini sering kali berada di lokasi yang sulit diakses, memiliki infrastruktur yang terbatas, serta menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang besar. Salah satu masalah utama adalah kekurangan guru dan pengajar berkualitas. Banyak daerah 3T mengalami ketidakseimbangan dalam distribusi guru, dengan rasio guru terhadap siswa yang sangat tinggi. Di beberapa wilayah, memiliki lebih dari 20 siswa per guru dianggap kurang memadai. Berdasarkan informasi dari blog. sahabat pedalaman, sekitar 62% guru di wilayah tertinggal memiliki kualifikasi di bawah D4/S1.

Selain yang sudah disebutkan, situasi fisik sekolah di kawasan 3T sering kali sangat memprihatinkan. Banyak sekolah tidak mempunyai sarana dasar seperti ruang kelas, perpustakaan, atau koneksi dengan teknologi informasi. Keterbatasan ini dapat menghalangi proses pembelajaran dan menyulitkan siswa dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Salah satu cara strategis untuk menangani masalah pendidikan yang telah lama terjadi di daerah 3T adalah dengan menciptakan bahan ajar di wilayah tersebut. Wilayah 3T sering kali

**TANTANGAN PROFESIONALISME GURU DI DAERAH 3T
(TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR) : KAJIAN LITERATUR
TERHADAP KETIMPANGAN PENDIDIKAN**

mengalami berbagai tantangan, seperti sulitnya akses, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Diharapkan bahwa dengan menyediakan materi pembelajaran yang lebih cocok dengan kebutuhan setempat, pendidikan di daerah ini bisa meningkat secara signifikan.

Daerah 3T sering kali mengalami tingkat pendidikan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah perkotaan atau wilayah yang lebih mudah diakses. Proses pendidikan di lokasi tersebut terhambat oleh kurangnya fasilitas dan akses yang terbatas terhadap teknologi informasi. Oleh karena itu, pengembangan materi pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dianggap sebagai solusi yang efektif. Ini termasuk konten, alat pembelajaran, serta cara mengajar.

Selanjutnya, pembuatan materi pembelajaran di daerah 3T harus mempertimbangkan kebijaksanaan lokal dan potensi yang ada. Dengan cara ini, materi yang disiapkan tidak hanya relevan di tingkat nasional, tetapi juga sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik. Hal ini berpotensi meningkatkan semangat belajar siswa lantaran materi yang diajarkan lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari dan mampu mengoptimalkan potensi lokal yang ada.

Secara keseluruhan, salah satu metode yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan mengembangkan materi pembelajaran khusus untuk daerah 3T. Dengan fokus pada wilayah ini, diharapkan kesenjangan pendidikan antara daerah 3T dan kawasan lainnya dapat diminimalkan. Dengan demikian, seluruh anak di negara ini berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali.

Inovasi menjadi kunci penting dalam mengatasi krisis pendidikan di daerah 3T. Beberapa bentuk inovasi yang ditawarkan meliputi pendidikan berbasis proyek, yang mengajak siswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah nyata di lingkungan mereka, serta digitalisasi pendidikan melalui penyediaan akses internet, perangkat teknologi, pelatihan guru, dan pemanfaatan e-learning. Selain itu, pengembangan aplikasi pembelajaran offline menjadi solusi kreatif untuk mengatasi keterbatasan akses internet di daerah terpencil. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menjadikan proses belajar lebih relevan, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan dukungan teknologi dan pendekatan yang kontekstual, inovasi pendidikan mampu mempersempit kesenjangan antara daerah 3T dan wilayah lainnya di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa tantangan profesionalisme guru di daerah 3T bersifat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek kesejahteraan, distribusi, pelatihan, hingga tantangan geografis dan sosial ekonomi. Kesenjangan pendidikan

**TANTANGAN PROFESIONALISME GURU DI DAERAH 3T
(TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR) : KAJIAN LITERATUR
TERHADAP KETIMPANGAN PENDIDIKAN**

yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan fisik, tetapi juga oleh lemahnya tata kelola pendidikan dan kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi daerah 3T. Upaya pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, dan pelaksanaan Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) merupakan langkah penting, namun masih memerlukan evaluasi dan perluasan jangkauan. Diperlukan pendekatan inovatif berbasis konteks lokal, termasuk pengembangan bahan ajar relevan dan pemanfaatan teknologi, untuk menjawab kebutuhan nyata pendidikan di daerah 3T. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data empiris sehingga disarankan adanya studi lanjutan berbasis lapangan guna memperkuat rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berdampak nyata.

Untuk itu, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait mengembangkan kebijakan berbasis data spasial dan kebutuhan lokal agar distribusi guru dan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan insentif dan jaminan kesejahteraan bagi guru di daerah 3T, termasuk perlindungan hukum serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, perluasan cakupan pelatihan guru yang kontekstual dengan kondisi daerah 3T sangat diperlukan, disertai dengan penyediaan pendampingan secara berkelanjutan. Di samping itu, integrasi inovasi teknologi pembelajaran, seperti aplikasi offline dan modul digital adaptif, menjadi penting untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki akses internet. Terakhir, kolaborasi lintas sektor, termasuk kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat lokal, perlu terus didorong dalam rangka pembangunan infrastruktur pendidikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan literatur tanpa data lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lanjutan berbasis penelitian tindakan atau survei lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan memperkaya formulasi kebijakan pendidikan yang berkeadilan bagi daerah 3T.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, Alicia, Aulia Putri Ferdianna, Karisma Dewi, Wikoyatur Rofikhoh, dan Aulia Prima Kharismaputra. "STRATEGI OPTIMALISASI PENDANAAN PENDIDIKAN DI DAERAH 3T: TANTANGAN DAN SOLUSI UNTUK PEMERATAAN AKSES DAN KUALITAS." *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 3, no. 1 (2025): 71-80.
- Asiska, I., & Nurmahmudah, F. (2022). Pengelolaan Tenaga Pendidikan di Daerah 3T SMP Negeri 1 Maratua. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7124-7131.
- Azmi Agustina, lu, Guru Madrasah Ibtidaiyah, P., Syarif Hidayatullah, U., & Masyithoh Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S. (2024). Pengaruh Lingkungan Sekolah

**TANTANGAN PROFESIONALISME GURU DI DAERAH 3T
(TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR) : KAJIAN LITERATUR
TERHADAP KETIMPANGAN PENDIDIKAN**

- Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Sekolah Dasar: Tinjauan Literatur. Jip, 2(6), 903–913.
- Dalimunthe, Singgar Mantahari, Mardiatul Husna Rambe, dan Nancy Dwinta. "Solusi Krisis Pendidikan Di Daerah 3T: Pendekatan Dan Inovasi Untuk Kemajuan." *El Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 1 (2025): 1-20.
- Kurniawan, M. A. (2022). KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN GURU DI DAERAH 3 T (TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL) DALAM PRESPEKTIF PEMANFAAATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA ISLAM. *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(01), 87-109.
- Rahmawati, Atika Puji. "Sistem pemerataan guru nasional (SPGN) sebagai sistem penyebaran guru untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah 3T." Dalam *Studi Sosial, Humaniora, dan Pendidikan (SHE): Seri Konferensi*, vol. 5, tidak. 2, hal.293-300. 2022.
- Rashid, F. (2022). *Buku Metode penelitian Fathor Rasyid*
- Sanoto, H., Soesanto, S., Soegito, A. T., & Kardoyo, K. (2021). Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru di Daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(2), 166-172.
- Satria, Dzaky, Ihsan Utama Kusasih, dan Gusmaneli Gusmaneli. "Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Saat Ini: Suatu Kajian Literatur." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2025): 292-309.
- Suryaningrum, S. (2023). Penguatan Kapasitas Guru Pada Implementasi Kurikulum Merdeka Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan*, 6(1), 165-172.
- Vania, A. S., Septianingrum, A. D., Suhandi, A. M., & Prihantini, P. (2021). Revitalisasi peran guru dalam pengelolaan kelas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) pada era revolusi industri 4.0. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5142-5150.